

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Istilah gender selama ini sudah digunakan oleh masyarakat luas untuk membedakan antara perempuan dan laki-laki baik dalam tulisan maupun forum. Gender diartikan sebagai konstruksi sosialkultural yang membedakan karakteristik maskulin dan feminim. Gender berbeda dari sex serta jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis. Istilah gender menurut para ahli adalah untuk mendeskripsikan perbedaan perempuan dan laki-laki yang mempunyai sifat bawaan yang dan bentukan sosial. Gender yaitu perbedaan peran, fungsi, serta tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil dari konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan dari zaman. Moore (Abdullah, 2003: 19).

Menurut UN Women (2016), persoalan kesetaraan gender tidak hanya terjadi dalam satu daerah atau wilayah, tetapi juga berlangsung hampir di setiap bagian dunia, termasuk di negara-negara di wilayah Asia Pasifik. Meskipun memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat kuat, kemajuan perempuan dalam partisipasi ekonomi di kawasan Asia Pasifik sangat lambat selama 20 tahun terakhir. Lebih lanjut, UN Women (2016) mengatakan bahwa jika kondisi seperti ini masih terjadi, maka untuk mencapai kesetaraan gender antara pria dan wanita di Asia-Pasifik membutuhkan waktu 118 tahun. Rendahnya kesetaraan gender sudah menjadi hal lazim di wilayah Asia Pasifik. Lebih menyedihkan lagi, isu tersebut

sulit terselesaikan karena lembaga-lembaga pemerintah yang diberi tanggung jawab menangani kesetaraan perempuan tidak memiliki dana yang cukup. Hambatan dari hal ini adalah kurangnya investasi. Oleh sebab itu, pemerintah dan setiap pemangku kepentingan sangat perlu memberikan perhatian lebih untuk menangani masalah ini. Untuk menangani permasalahan kesetaraan gender, tiap-tiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah perlu memperhatikan masalah ini. Dengan begitu, usaha untuk meningkatkan pemberdayaan dan pembangunan gender dapat terlaksana dengan baik. (UN Women, 2016).

Kesetaraan gender tidak hanya menjadi masalah wanita tetapi menjadi persoalan pembangunan, pembangunan gender merupakan salah satu indikator yang di gunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Hasil-hasil pembangunan yang semula ditunjukkan untuk memberi manfaat menyeluruh kepada masyarakat, perempuan maupun laki-laki, pada kenyataannya belum bisa dinikmati secara merata oleh laki-laki dan perempuan. Ketidaksetaraan gender seringkali membatasi pilihan yang tersedia bagi perempuan sehingga sangat membatasi kemampuan perempuan untuk berpartisipasi atau menikmati hasil dari pembangunan. Beban pada kehidupan manusia adalah beban pembangunan karena meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah tujuan akhir pembangunan. Pada akhirnya keberhasilan dari pembangunan adalah kesejahteraan untuk masyarakatnya, tidak terkecuali kaum perempuan. Era globalisasi dan demokrasi saat ini terbuka lebar bagi setiap warga negara untuk memperoleh hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dalam pembangunan.

Ketidaksetaraan gender memberikan beban pula pada produktivitas, efisiensi, dan kemajuan ekonomi. Dengan menahan akumulasi sumber daya manusia di rumah dan di pasar tenaga kerja, serta dengan sistematis mengecualikan perempuan atau laki-laki dari akses ke sumber daya, jasa publik, atau aktivitas produktif, maka diskriminasi gender mengurangi kapasitas suatu perekonomian untuk tumbuh serta mengurangi kapasitas untuk meningkatkan standar kehidupan. (World Bank, 2005).

Untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengarusutamaan Gender terhadap Pembangunan Nasional. Tetapi, walaupun kesetaraan gender telah meningkat sedikit demi sedikit, diskriminasi gender masih terjadi dalam seluruh aspek kehidupan. Perempuan masih mendapatkan diskriminasi dalam mendapatkan hak, mendapatkan sumber kesehatan, pendidikan, bahkan ketenagakerjaan.

Indonesia adalah salah satu negara yang mengalami perkembangan yang pesat dalam mengurangi ketimpangan dalam bidang pendidikan antara laki-laki dan perempuan yang ditandai dengan semakin mengecilnya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam capaian tingkat pendidikan. Walaupun begitu, tingkat produktivitas dan partisipasi angkatan kerja perempuan masih terlihat rendah. Peran perempuan dalam pembangunan harus terus diperlihatkan dalam kebijakan daerah maupun nasional.

Indeks pertumbuhan yang berkaitan dengan gender adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG). Indeks Pembangunan Gender mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tetapi menangkap ketidaksetaraan dalam pencapaian antara perempuan dan laki-laki. (UNDP, 2004).

Tabel 1.1

IPG 4 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2013-2017 (%)

Provinsi	2015	2016	2017
DKI Jakarta	94.72	94.98	94.70
Jawa Barat	89.11	89.56	89.18
Jawa Tengah	92.21	92.22	91.94
Jawa Timur	91.07	90.72	90.76

Sumber: Badan Pusat Statistik 2017

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada 4 Provinsi ini cenderung terus meningkat di setiap tahunnya walaupun tidak begitu signifikan, tetapi IPG di setiap Provinsi tersebut meningkat sedikit demi sedikit. Provinsi yang persentasinya paling tinggi adalah Provinsi DKI Jakarta dengan 94,72% pada tahun 2015 dan meningkat di tahun 2017 menjadi 94,70%. Lalu, Provinsi Jawa Tengah di tahun 2015 dengan 92,21% menurun menjadi 91,94% di tahun 2017. Selanjutnya, Provinsi Jawa Timur di tahun 2015 sebesar 91,07% menurun menjadi 90,76% di tahun 2017. Provinsi Jawa Barat di tahun 2015 sebesar 89,11 menjadi 89,18% pada tahun 2017. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjelaskan bila IPG dan IPM mempunyai

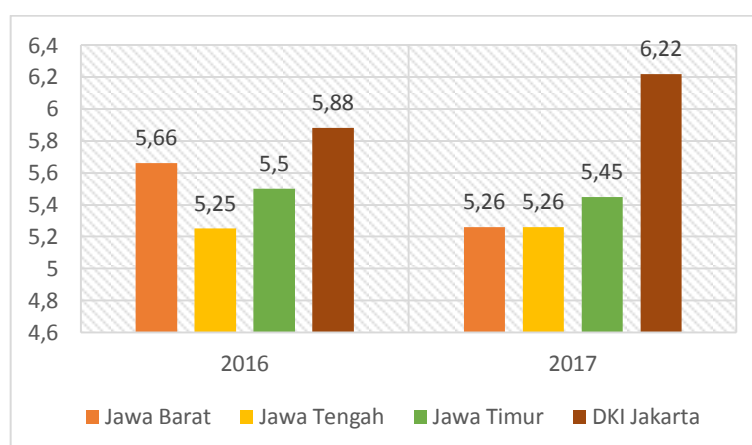
nilai yang sama berarti menandakan tidak terjadinya ketimpangan gender. Apabila, nilai IPG lebih rendah dari IPM maka terjadi ketimpangan gender.

Tabel 1.2
IPM dan IPG 4 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2017 (%)

Provinsi	IPM	IPG	Selisih
DKI Jakarta	80.06	94.70	14.64
Jawa Barat	70.69	89.18	18.49
Jawa Tengah	70.52	91.94	21.42
Jawa Timur	70.27	90.76	20.49

Sumber: Badan Pusat Statistik 2017

Dari tabel 1.2 diatas terlihat bahwa pengurangan IPM terhadap IPG akan terlihat seberapa besar atau kecil ketimpangan pada gender yang ada. Provinsi Jawa Tengah yang memiliki ketimpangan paling besar dengan selisih sebesar 21,42% pada tahun 2017. Dan Provinsi paling rendah ketimpangannya adalah Provinsi DKI Jakarta dengan persentase selisih sebesar 14,64% di tahun 2017.



Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi 4 Provinsi di Pulau Jawa
Tahun 2016-2017 (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik 2017

Dari gambar 1.1 diatas pertumbuhan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan persentase yang paling tinggi diantara 3 Provinsi lainnya yaitu sebesar 5,88% di tahun 2016 dan meningkat di tahun 2017 menjadi 6.22%. Sedangkan Provinsi yang persentasenya paling rendah adalah Provinsi Jawa Tengah dengan persentase 5,25% pada tahun 2016 dan meningkat 1% menjadi 5,26% pada tahun 2017.

Sebagian besar Provinsi yang memiliki kesetaraan gender paling tinggi, biasanya juga akan memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula. Terlihat bahwa 4 Provinsi ini memiliki ketimpangan gender yang lebih besar dari pada pertumbuhan ekonomi nya. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya pengaruh ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam masalah ini peneliti ingin penganalisis tentang ketimpangan gender. Penelitian ini mengangkat judul **“ANALISIS KETIMPANGAN GENDER TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI 4 PROVINSI DI PULAU JAWA TAHUN 2011-2017”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka identifikasi masalah yang diambil untuk penelitian ini, antara lain;

1. Bagaimana pengaruh ketimpangan gender laki-laki dan perempuan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi 4 Provinsi di Pulau Jawa.

2. Bagaimana pengaruh ketimpangan gender laki-laki dan perempuan secara bersama-sama terhadap Pertumbuhan Ekonomi 4 Provinsi di Pulau Jawa.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh ketimpangan gender dari laki-laki terhadap Pertumbuhan Ekonomi 4 Provinsi di Pulau Jawa.
2. Untuk menganalisis pengaruh ketimpangan gender dari perempuan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 4 Provinsi di Pulau Jawa.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dengan sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi di Universitas Siliwangi.
2. Dapat digunakan untuk bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam menentukan kebijakan yang benar, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kesetaraan terhadap gender di bidang pendidikan dan kesehatan 4 Provinsi di Pulau Jawa.
3. Dapat digunakan untuk bahan acuan dan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam hal meningkatkan kesetaraan gender terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya terhadap 4 Provinsi di Pulau Jawa.
4. Dapat menambah literatur ilmiah tentang kesetaraan gender terhadap pertumbuhan ekonomi.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, data yang di peroleh dari website Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementrian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Tabel 1.3
Matriks Jadwal Penelitian

Keterangan	Tahun 2019																		
	Februari				Maret				April				Mei				Juni		
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
Pengajuan Judul																			
Observasi Awal																			
Pembuatan Usulan Penelitian																			
Seminar Usulan Penelitian																			
Revisi Usulan Penelitian																			
Pengumpulan Data																			
Analisis Data																			
Penyusunan Skripsi																			
Sidang Skripsi																			